

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan Indonesia mulai menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi yang bertujuan untuk menjawab keinginan juga aspirasi daripada seluruh rakyat, sebagai bentuk demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi yang mampu membuat pemerintahan di Indonesia menjadi semakin adil, juga pemerintah semakin bijak dalam mengambil keputusan. Tetapi perkembangannya masih banyak PR yang harus di benahi, mulai dari kebebasan berpendapat di muka umum harus dilindungi sampai dengan sistem presidential threshold 20% yang cenderung menguntungkan para kolega yang mampu membayar ongkos politik. (Afan Gaffar, 2006:58)

Beberapa kecenderungan inti *post-democracy* di atas pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi baik pada level nasional maupun lokal. Dengan kondisi demikian, munculah sebuah demokrasi tanpa *demos*. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada saat ini, namun telah memiliki gejala-gejala sejak awal reformasi. Tercermin dari berbagai istilah yang diberikan oleh beberapa pemerhati politik Indonesia, seperti “Delegative Democracy” (Slatter 2004), “Patrimonial Democracy” (Weber 2006), “Patronage Democracy” (Klinken 2009), “Political Cartel” (Ambardi 2009), “Clientelism” (Aspinal dan Berenschot 2019; Rahmawati 2018), dan “Oligarchy” (Bunte and Ufen 2009, Hadiz and Robison 2004,

Winters, 2011:78).

Secara spesifik setidaknya ada sebelas karakteristik demokrasi di Indonesia saat ini yang mencerminkan demokrasi tanpa *demos* itu. *Pertama*, lemahnya pelaksanaan *checks and balances*. Ini terlihat dari lemahnya peran partai, DPR, kehakiman, dan lain sebagainya di hadapan eksekutif. *Kedua*, meredupnya sikap kritis *civil society*, baik pers, LSM, akademisi, dan sebagainya sebagai mitra pemerintah; dan pembungkaman kalangan aktivis-kritis. Akibatnya, demokrasi kita sejatinya tengah tumbuh dalam “tanah yang gersang”. (Afan Gaffar, 2006:66)

*Ketiga*, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan/pendewasaan berpolitik. Para elite juga tidak cukup berhasil dalam memelihara soliditas masyarakat, menghindari personifikasi politik, dan mendorong demokrasi substansial-rasional. Inilah yang akhir-akhir ini menjadi pendorong berkembangnya pembodohan politik dan manipulasi kepentingan serta pembelahan politik. *Keempat*, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elite ataupun masyarakat, seiring dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elite dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. *Kelima*, penegakan hukum yang tebang pilih. Kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum kita. Selain itu, ada kecenderungan menerabas aturan yang terlihat pada aturan-aturan kekinian, termasuk *omnibus law*.(Afan Gaffar, 2006:68)

Dengan kelima karakteristik itu, tidak mengherankan jika nilai demokrasi Indonesia menjadi jeblok. Dari hasil studi Economist

Intelligence Unit (EIU), dalam dua tahun terakhir ini, di kawasan Asia Tenggara Indonesia berada di peringkat 3, di bawah Malaysia dan Filipina, dengan kategori sebagai “*flawed democracy*” (demokrasi yang cacat).

**Tabel 1.1**

**Peringkat Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2019**

NO	COUNTRY	GLOBAL RANK	REGIONAL RANK	SCORE	CATEGORY
1	Malaysia	43	7	7.16	Flawed Democracy
2	Filipina	54	9	6.64	Flawed Democracy
3	Indonesia	64	11	6.48	Flawed Democracy
4	Thailand	68	12	6.32	Flawed Democracy
5	Singapore	75	15	4.63	Flawed Democracy
6	Myanmar	122	22	3.55	Authoritarian
7	Cambodia	124	23	3.53	Authoritarian
8	Vietnam	136	24	3.08	Authoritarian
9	Laos	155	27	2.14	Authoritarian

*Sumber: EIU Index 2019*

Sementara menurut Freedom House, Indonesia sudah masuk negara dalam kategori *partly free*, dan status ini sudah berlangsung cukup lama. Secara umum beberapa kajian terkini juga menyebutkan Indonesia sebagai negara yang tidak murni demokrasi atau demokrasi sebatas prosedur saja.

Menurut data indeks badan statistic provinsi sumatera selatan secara umum, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 sebesar 74,04 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 6,91 poin dibandingkan dengan IDI Sumsel 2016 sebesar 80,95. Nilai indeks demokrasi Sumsel mengalami penurunan dan tingkat demokrasi di Provinsi Sumsel pada kategori “sedang” sedangkan sebelumnya sudah “baik”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks <60). (BPS Sumsel, 2017)

Pada dasawarsa tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 arus perkembangan demokratis di Indonesia semakin deras mendobrak pintu tiran rezim absolut Orde (Soeharto) dimana- mana muncul kelompok – kelompok masyarakat civil yang terorganisir baik yang bersifat studi kebudayaan, kelompok studi demokrasi dan kelompok – kelompok studi yang berfokus pada penegakkan Hukum dan Ham (termasuk advokasi terhadap hak – hak buruh, petani, lingkungan hidup, kaum perempuan dan anak jalanan) termasuk di Kota Palembang. Diantara sekian banyak kelompok – kelompok pergerakan masyarakat civil tersebut terdapat

beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang sangat konsisten dalam menginisiasi dan memfasilitasi kelompok masyarakat civil tersebut diantaranya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Palembang, yang dimana lembaga tersebut kerap kali berbenturan dengan tatanan dan tindakan penguasa kala itu dalam menyuarakan dan memperjuangkan kenyataan atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dirasakan oleh rakyat. (Miftha Thoha, 2003:48)

Bergulirnya era reformasi menggantikan era orde baru membuat ruang politik yang semakin terbuka lebar dengan lahirnya desentralisasi demokrasi daerah, sering dengan diberikannya kebebasan yang luas memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat untuk berekspresi dalam berbagai bentuk organisasi sosial politik non pemerintahan dengan mengusung berbagai asas dan tujuan masing-masing. Tidak ada lagi hegemoni ideologi yang dijalankan lewat berbagai Undang-undang yang mendudukan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi seperti pada masa Orde Baru yang menyebabkan aktifitas organisasi kepemudaan dan organisasi sosial politik lainnya berada dalam ruang sempit, partai-partai politik dengan latar belakang berbagai ideologi bermunculan, dengan dimulainya era kebebasan ini. Organisasi-organisasi sosial politik termasuk Organisasi kepemudaan tumbuh dan subur. (Kaban, 2000:56)

Gagalnya konsolidasi demokrasi pasca runtuhnya rejim otoritarianisme Soeharto membawa implikasi negatif bagi iklim demokrasi di era reformasi. Kebanyakan masyarakat terjebak pada euforia reformasi yang membuat mereka lupa bahwa runtuhnya Orde Baru tidak disertai melenyapnya kekuatan oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto. Justru, kekuatan oligarki yang semula bersenggama dengan rezim Soeharto kembali mengonsolidasi diri (beradaptasi) dengan rezim reformasi yang jauh lebih menguntungkannya. Dominasi oligarki dalam ranah politik Indonesia terjadi karena kenaifan asumsi reformasi institusional neoliberal yang percaya akan primasi pengelolaan institusi rasional. Kenaifan ini mengabaikan keberadaan relasi ekonomi politik oligarki yang menyejarah. Kemampuan oligarki untuk menaklukkan kekuasaan negara serta melakukan disorganisasi atas kekuatan oposisi masyarakat sipil, membuat proses reformasi institusional neoliberal tidak memiliki basis sosial dan politik yang kuat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan oligarki dapat mempertahankan dominasi politiknya, yang dengannya merepresi kemungkinan bagi munculnya agensi politik non- oligarki. (Kaban, 2000:74)

Mengacu pada perkembangan demokrasi di Palembang, kita lihat bahwa praktek politik oligarki ini sangat di larang dalam sistem demokrasi akan tetapi pada realitanya banyak para elit-elit politik kekuasaan tetap menjalankan sistem oligarki ini. Demokrasi oligarki merupakan istilah yang digunakan oleh Yuki Fukuoka (2013), yang merujuk pada suatu tatanan demokrasi di mana pertarungan politik didominasi oleh koalisi kepentingan yang predatoris serta mendorong peminggiran kekuatan masyarakat sipil. Contoh kasus nasional praktik oligarki Jokowi yang mencalonkan anak dan menantunya menjadi

walikota dan kasus di Palembang yaitu kerabat, ponakan, adik, bahkan sampai anak dari walikota Palembang Harnojoyo pun ikut berkiprah dalam dunia politik. Sangat disayangkan jika OKP yang ada di kota Palembang khususnya KNPI ini hanya berdiam tanpa adanya auman suara demi menggakannya sebuah keadilan yang benar – benar demokrasi. Semakin masyarakat diam maka disinilah letak peran KNPI dalam mengambil gerakan untuk meluruskan dan menjalankan tugasnya sebagai lembaga peduli hak rakyat. (Loekman Soetrisno, 2000:80)

Di kota Palembang praktik politik yang ideal tidak terlaksana dengan semestinya. Dalam kasus daerah – daerah yang mengalami calon tunggal artinya di daerah tersebut para pemegang perahu ( partai politik) tidak gencar dalam menciptakan kader – kader terbaik untuk mengikuti kompetisi lima tahunan tersebut. Terlihat bahwa partai politik malah tidak mempraktikkan mekanisme demokratis dan sering terjebak dalam budaya praktik politik oligarki. Sehingga hal ini yang menyebabkan peneliti ingin melihat sejauh mana peran sesungguhnya KNPI dalam menyikapi kasus yang sangat jauh dari proses rekonstruksi demokrasi di Palembang. (Adi Suryadi, 2006)

Namun dalam sistem politik yang demokratis, KNPI dan pemerintah kota Palembang seharusnya dapat bersama – sama memberikan sumbangan penting dalam hal peningkatan – peningkatan hak – hak rakyat. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan wajah kekuasaan menjadi tidak sesolid dulu, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan. Dalam pekungannya KNPI di kota Palembang banyak melakukan – melakukan sebuah gerakan dalam melaksanakan tugas – tugas demokratis demi keberlangsungan masyarakat agar

tidak mudah dibodohi oleh elit politik yang terlalu ambisius dalam merebutkan kekuasaan. Bahkan dimasa yang hampir melemahnya titik demokrasi di kota Palembang membuat KNPI ini banyak memilih untuk berperan dalam menyuarkan sebuah keadilan itu sendiri. Dibalik itu semua cara KNPI di kota Palembang terus gencar dalam melakukan konsolidasi ataupun *focused group discussion* (FGD) bersama pihak – pihak pemerintah guna memperatnya persatuan seluruh OKP yang dalam di kota Palembang agar tetap bersinegri dalam melakukan peranan sebagai penegak demokrasi bagi seluruh rakyat di kota Palembang. (Yancoganews.com)

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat sebagai alternatif untuk munculnya Civil Society khususnya di kota Palembang. KNPI dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses meperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan Civil Society, karena Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) merupakan tulang punggung dari Civil Society yang kuat dan mandiri. Sedangkan pemberdayaan Civil Society merupakan *sine qua non* bagi proses demokratisasi di Indonesia. (Adi Suryadi, p,2006)

Namun sayangnya, masih terdapat kesenjangan antara pemerintah satu pihak dengan KNPI di lain pihak di kota Palembang, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar institusi sering kali memicu konflik diantara kedua institusi ini, disitu pihak KNPI beranggapan memiliki fungsi pengawasan dan memperjuangkan hak – hak serta aspirasinya sebagai peran serta masyarakat dan dilain pihak, pemerintah tidak mau pekerjaannya seolah di intervensi atau direcoki oleh kelompok – kelompok masyarakat baik itu OKP maupun Ormas/OKP.

Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas serta meneliti masalah ini yang akan dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul “ **Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Terhadap Rekonstruksi Demokrasi di Palembang** “.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas telah di paparkan dalam latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran KNPI dalam rekonstruksi demokrasi di kota Palembang?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi KNPI dalam rekonstruksi demokrasi di kota Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KNPI dalam rekonstruksi demokrasi di kota Palembang.
3. Untuk mengatahui tantangan yang dihadapi KNPI dalam rekonstruksi demokrasi di kota Palembang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain, terlebih lagi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu yang menjadi manfaat dari penelitian adalah:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu, dengan memberi kontribusi dalam memaparkan peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terhadap Praktik politik oligarki sebagai wujud Rekonstruksi Demokrasi di Kota Palembang.

#### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi banyak pihak yang memiliki kepetingan terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terhadap Praktik Politik Oligarki sebagai wujud Rekonstruksi Demokrasi di Kota Palembang.

#### 4. Kegunaan Akademis

Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang guna mencapai gelar Sarjana Negara (S 1) pada Jurusan Ilmu Politik.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebelum masuk pada uraian kerangka teori, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan tinjauan yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka akan memberikan gambaran pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan pembahasan yang sama seperti penelitian penulis. Telah banyak sekali penelitian yang memaparkan tentang peran .

*Pertama*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Arnold Andreas Nasaban (2015) yang berjudul “*Demokrasi lokal dan politik entitas Batak : Kajian basis massa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Etnis Batak*”, dari Universitas Airlangga Program Studi Ilmu Politik. (Andreas, 2015)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tersebut lebih memfokuskan pada kasus demokrasi lokal terhadap etnis batak yang dimana etnis tersebut lebih mendominasi kemenangan pemilu.

*Kedua*, terdapat pula penelitian skripsi yang dilakukan oleh Gilang Adi Mahardika (2016) yang berjudul “*Peran KNPI sebagai sarana pendidikan politik pemuda (studi diskriptif di DPD KNPI DKI Jakarta)*”. di Universitas Negeri Jakarta program studi ilmu politik. ( Mahardika, 2016)

Perbedaan penelitian tersebut lebih menjurus pada tingkat pendidikan politik dimasyarakat juga menggunakan teori peran sebagai pendekatan penelitian.

*Ketiga*, penelitian “skripsi yang dilakukan oleh Rukminijati (1994) yang berjudul *Peranan Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam pembangunan politik (Studi kasus KNPI Propinsi Dt.I Jawa Barat)*” dari Universitas Gajah Mada progam studi ilmu politik. Penelitian ini menggunakan studi kebijakan, namun dilihat dari proses perumusan kebijakan. ( Rukminijati, 1994)

*Keempat*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dian Ikhwan (2008) yang berjudul " *Identifikasi Kegiatan Politik Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta Di Era Reformasi*" dari Universitas Syarif hidayahtullah Jakarta . (Ikhwan Dian, 2008)

Perbedaan dari penelitian adalah penelitian ini lebih menekankan pada kasus kegiatan politik dengan menggunakan metode penelitian basis lapangan.

*Kelima*, penelitin skripsi yang dilakukan oleh Ramadhan (2020) yang berjudul " *Representasi demokrasi dalam karya fotografi (analisis semiotik pada buku foto Kilas Balik 2018 ANTARFOTO)*." Dari Universitas Muhammadiyah Malang Program Studi Ilmu Politik. (Ramadhan, 2020)

Perbedaan penelitian ini lebih kepada penelitian jenis studi ilmiah atau kuantitatif yang tidak secara langsung turun kelapangan untuk mendapatkan sumber datanya. Sedangkan penulis lebih cenderung mengfokuskan penelitian deskriptif kualitatif.

Dari kelima penelitian yang telah ada dan dipaparkan di atas, penulis lebih banyak menggunakan pendekatan dengan menggunakan teori sistem namun ditinjau dari rekonstruksi demokrasi yang dilakukan KNPI dengan menggunakan berbagai perangkat demokrasi yang ada.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variable independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variable moderator dan intervening, maka juga dijelaskan, mengapa variable itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir Suriasumantri, 1986 dalam (Sugiyono, 2009 : 92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori – teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Kerangka utama agar suatu kerangka pemikiran bisa menyakini ilmuan, adalah alur – alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu pemikiran yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variable yang disusun dari teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variable penelitian. Sintesa tentang hubungan variable tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan.

Konsep peranan menurut ilmuwan Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki satu tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status – status sosial khusus.

Konsep demokrasi menurut ilmuwan Abraham Lincoln dalam Istilah : *government of the people, by the people, for the people*. Dalam sistem ini pemegang kekuasaan haruslah bertanggung jawab pada rakyat dan memerintah atas namanya. Kekuasaan pun diperoleh melalui kompetisi atau sistem pemilihan umum yang bebas dan terbuka. Kerena itu pula, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh kekuasaan secara demokratis.

Konsep Ormas dan OKP menurut ilmuwan (Holloway 1997) bahwa bentuk organisasi yang memperhatikan kepentingan masyarakat yang secara mandiri dan bukan untuk mencari keuntungan atau organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sipil (Holloway 1997) adalah suatu pergerakan sosial dari lapisan masyarakat yang terorganisir dimana menghadirkan banyak orang yang berbeda dan terkadang berlawanan. Menurut (Fowler 1997) yang mengklarifikasi

tentang perbedaan antara Ormas dan Non-Organisasi. Organisasi masyarakat sipil: tidak dibentuk untuk menjadi organisasi yang mapan, tidak harus dibutuhkan, tetapi sebagai pilihan masyarakat yang secara sukarela untuk membantu masyarakat dalam hukum, dibentuk oleh individu yang mandiri dan bukan bagian dari pemerintah ataupun dikendalikan oleh suatu badan publik, organisasi masyarakat sipil ini mematuhi aturan undang-undang, mendaftarkan diri kepada pemerintah, dan mengelola sumber daya ormas, tercatat sebagai organisasi untuk pengenalan sosial dan menerima prinsip tanggung jawab social.

Sedangkan NGOs (atau organisasi pengembangan dan kesejahteraan masyarakat) yaitu: suatu legitimasi di masyarakat yang lemah/miskin yaitu terjadi ketidakadilan dan mereka alami, melakukan aksi ketika adanya dukungan dan memberikan bantuan dana untuk masyarakat miskin, sebagian besar anggota beroperasi atas berbagai yang secara parsial (sebagian datang dari pemerintah dan sector bisnis), didasarkan pada nilai-nilai sukarela (Jurnal Sosiologi , 2016 : 01).

## **1. Teori Sistem David Easton**

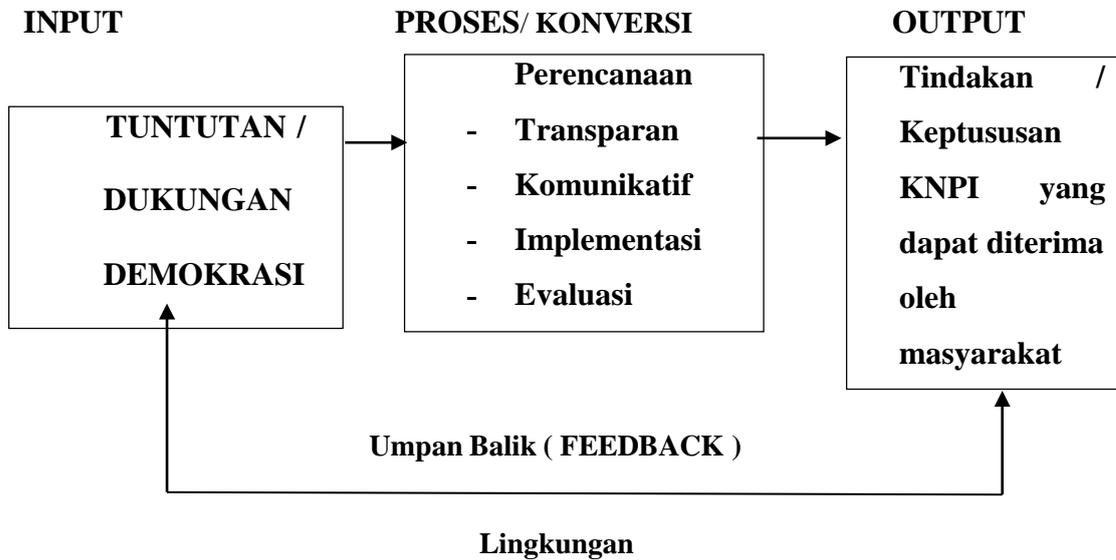
Menurut David Easton, sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat di dalamnya di buat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif di implementasikan (Varma,1992). Esten memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktifitas yang saling berkaitan. Aktifitas itu menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktifitas itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan . bila kehidupan politik di pandang sebagai suatu sistem aktifitas, maka dijumpai suatu konsekuensi tertentu dari cara melakukan analisis mengenai oprasi suatu sistem.

Masukan-masukan (input) yang datang dari komponen lain dalam sistem merupakan energy bagi sistem itu sendiri yang menyebabkan sistem itu berjalan. Masukan itu di konfersi oleh proses sistem politik sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang otoritatif. Kebijakan-kebiajakn itu mempunyai konsekuensi terhadap sistem politik itu sendiri maupun terhadap masyrakat lingkungan nya. (Varma, 1992)

**Tabel 1.2**

**Flow Chart**

**Peran KNPI Terhadap Pemerintah dan Masyarakat**



**Sumber :** Teori Sistem David Easton “ *The Political System* ” (1953)

Berdasarkan bagan diatas, dimana dijelaskan bahwa Input bisa disebut sebagai pemberi masukan dari sistem politik itu sendiri, input terdiri dari tuntutan demokrasi masyarakat yang menganggap bahwa politik oligarki adalah ketidakadilan dalam proses pemilu demokrasi. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik atau lingkungan dimana sistem politik itu berada, tuntutan itu kemudian digarap oleh para aktivis – aktivis KNPI yang akan menjadi solusi dari dinamika dalam kasus oligarki politik melalui perencanaan, Transparan, Penerapan dan jika ada kesalahan atau kegagalan maka akan di evaluasi. Di sisi lain, ada dukungan merupakan tindakan yang bisa melestarikan atau menolak sistem politik. Bisa dilihat disini bahwasannya dukungan ada yang bersifat positif dan negatif terhadap sistem politik tersebut.

Kemudian tuntutan dan dukungan itu masuk dalam sistem politik, setelah diproses dalam sistem politik kemudian muncul sebuah keluaran yang disebut Output. Menurut Easton Output terdiri dari keputusan dan tindakan, dari output ini muncul yang bernama Feedback (umpan balik) yang kemudian menghasilkan kebijakan pemerintah atau tindakan KNPI terhadap kasus dinamika politik oligarki yang dampaknya kembali dirasakan di Input. Yang dimaksudkan disini adalah apakah keputusan dan tindakan itu sesuai dengan tuntutan dan dukungan yang berasal dari Input. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian melibatkan kerangka teoritis dan pembelajaran berbagai teknik yang dapat dilakukan dalam penelitian dan pelaksanaan tes, eksperimen, survei, dan studi kritis. Dilihat dari tujuan, metodologi penelitian bertujuan untuk menerapkan prosedur yang benar untuk menemukan solusi dari problem penelitian. (Roikan, 2019) berikut ini metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Jary dan Jary (1991), penelitian kualitatif adalah penelitian yang penelitiannya mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat yang empatik untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang diteliti (Roikan, 2019)

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yang kemudian peneliti interpretasikan dengan menggunakan metode penulisan, pengkodean, dan analisis trend an tema yang ketat dan sistematis. (Roikan, 2019)

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggambarkan

permasalahan yang terjadi melalui penelitian lapangan sesuai fakta, teori dan konsep berdasarkan data yang didapat, berkaitan dengan fenomena yang penulis teliti dalam penelitian ini, tentang peran KNPI terhadap rekonstruksi demokrasi di Palembang.

## 2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data *primer* dan data *sekunder*, data primer penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan.

Sedangkan, data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui sumber seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, berita, dan internet yang berkaitan dengan peran KNPI terhadap rekonstruksi demokrasi di Palembang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut

:

### a. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi atau

data menggunakan pancaindra. Pengamatan digambarkan sebagai proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi berupa pengamatan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan peran KNPI terhadap rekonstruksi demokrasi di Palembang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan Tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam wawancara ini menyusun menggunakan pertanyaan terbuka, karena dalam hal ini akan mempermudah untuk diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan kepada KNPI serta jajaran pengurus serta para nasumber yang sudah terlampirkan. (Prof. Dr. Husaini Usman, 2008)

Dalam hal ini informan utama dalam penelitain ini

1. Ketua KNPI Palembang Periode 2019-2023, Subandi
2. Sekertaris KNPI Sumsel Periode 2019-2023, Novarizal
3. Badan Kesbangpol Palembang, Andi Anugraha (Kabid Organisasi & Hubungan Masyarakat)
4. Tokoh Masyarakat, lidayanto (Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumsel Periode 2003)
5. Tokoh Akademis, Azwar Agus ( Rektor Universitas Taman

Siswa 2020-2025)

Adapun alasan peneliti mengambil keenam narasumber adalah peneliti lebih mengutamakan ketersediaan narasumber dalam proses memberikan informasi agar penyusunan lebih cepat efektif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau masalah yang akan diteliti, melalui literature buku, berita, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, internet, dan juga arsip dan ulasan-ulasan yang berkaitan dengan judul permasalahan. (Prof. Dr. Husaini Usman, 2008)

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor sekretariat KNPI yang berada di jalan aerobic kampus no.2 b, lorong pakjo, kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126. Dimana kantor ini berdekatan langsung dengan gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumsel.

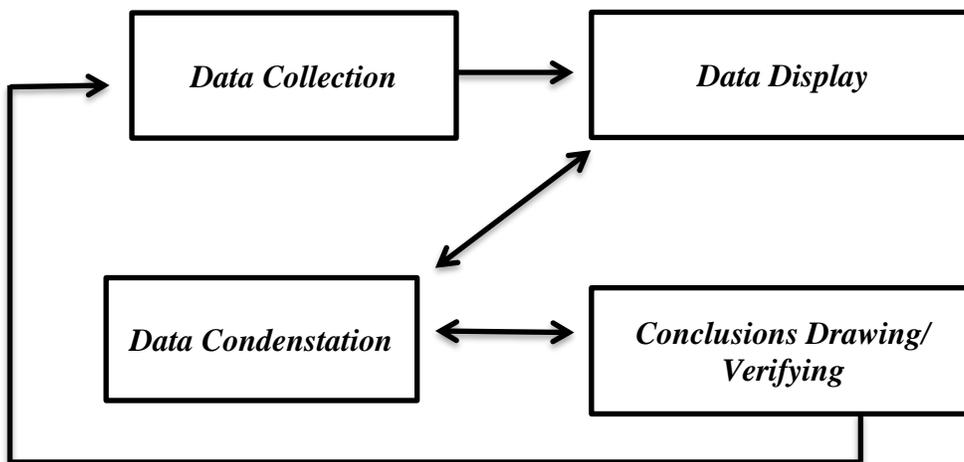
5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles and Huberman. Penulis menganalisis data pada saat

pengumpulan data berlangsung. Pada saat di lapangan peneliti akan melakukan analisis terhadap jawaban hasil wawancara dari narasumber. Analisis data dilakukan secara terus menerus sehingga peneliti dapat menarik simpulan akhir. (Uman Sidiq dan Miftachul Choiri, 2019:78). Pola analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dapat dilihat dari table berikut.

**Tabel 1.3 Komponen dalam Analisis Data**



*Sumber: Umar Sidiq & Miftachul Chorir, 2019:78*

Berdasarkan pada konsep tersebut, teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan adalah hasil wawancara secara langsung terhadap narasumber, kemudian penulis memilih dan memusatkan hasil wawancara serta menyederhanakan data yang sudah didapat yang

berkaitan dengan Peran KNPI Terhadap Rekonstruksi Demokrasi di Palembang.

b. Kondensasi Data atau Penyederhanaan Data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empiris lainnya. Kondensasi data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat. Kondensasi mengakomodir data secara menyeluruh tanpa harus mengurangi temuan lapangan yang diperoleh selama penelitian (proses penjaringan data) berlangsung.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun dan menyajikan data. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan bagan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Peran KNPI Terhadap Rekonstruksi Demokrasi di Palembang.

d. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara terus menerus dan dapat berubah jika ditemukannya bukti-bukti baru dan kuat yang mendukung penelitian untuk ke tahap selanjutnya, yang pasti kuat kaitannya dengan Peran KNPI Terhadap Rekonstruksi Demokrasi di Palembang.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematis penulisan digunakan untuk mendapatkan gambaran terperinci dan untuk memudahkan isi dari pada skripsi ini, sehingga penulis membagi sistematika ke dalam lima bab, sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi masalah dengan adanya rumusan masalah. Lalu dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data, jenis data, teknik pengumpulan data dan lokasi penelitian.

### **BAB II Kajian Kepustakaan Yang Relevan**

Bagian ini khusus membicarakan tentang berbagai materi yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

### **BAB III Gambaran umum Lokasi Penelitian**

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran dari lokasi penelitian yaitu Kantor Sekertariat KNPI Palembang, Sumatera Selatan.

### **BAB IV Hasil Dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dijelaskan data dan hasil analisis dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada secara sistematis dan ilmiah.

### **BAB V Penutup**

Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran yang membangun bagi objek penelitian bias lebih baik lagi

kedepannya.